SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 3, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Kebebasan Berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara: Analisis Komparatif Budaya Politik, Kekuasaan, dan Akses Informasi

Nazwa Revalinda[1], Gina Dewi M[2], Wikdah Halimah[3]
[1] Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
[2] Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111045@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 22th, 2026
Revised Oct 24th, 2026
Accepted Oct 28th, 2026

Keyword:
Kebebasan berpendapat; Korea Selatan; Korea Utara; Budaya politik; Sistem politik.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mengenai kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara berdasarkan budaya politik, kelembagaan, struktur kekuasaan, dan akses informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional. Analisis menggunakan teori budaya politik Almond dan Verba serta pendekatan institusional dan struktural. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki ruang kebebasan berpendapat yang relatif terbuka melalui kompetisi politik, keberagaman media, dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, sedangkan Korea Utara menerapkan pengendalian informasi yang ketat sehingga membatasi akses terhadap informasi independen dan penyampaian kritik kepada pemerintah. Meskipun demikian, keberadaan media alternatif menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam mengakses informasi di luar saluran resmi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi juga oleh budaya politik, struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses informasi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Karena memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pandangan, mengkritik kebijakan terhadap pemerintah, memperoleh informasi, serta berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi, karena keberlansungan pertukaran gagasan, pengawasan terhadap kekuasaan, dan pembentukan opini publik. Namun di dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak berlangsung sama di setiap negara. Perbedaan sistem politik struktur kelembagaan kondisi sosial, sejarah dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesempatan masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara terbuka.

Perbedaan pelaksana kebebasan berpendapat dapat dikaji melalui perbandingan Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara memiliki latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berkaitan, tetapi berkembangan dengan sistem politik serta pola hubungan negara dan masyarakat yang berbeda. Korea Selatan mengembangkan sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap kompetisi politik, pemilihan umum, keberadaan partai oposisi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. kebebasan berekspresi di Korea Selatan dan masih menghadapi tantangan terutama berkaitan dengan regulasi dinamika politik dan batasan hukum. Korea Utara yang menerapkan sistem politik terpusat dengan kontrol negara yang kuat terhadap media, arus informasi dan aktivitas politik Masyarakat. Laporan komisi penyelidikan perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak asasi manusia di Korea Utara dapat menjelaskan pembatasan sistematis terhadap kebebasan berpendapat, akses informasi, dan berbagai hak dasar Masyarakat dalam (United Nations Human Right Council, 2014). Dari perbedaan tersebut dapat memperlihatkan bahwa, ruang kebebasan berpendapat tidak hanya ditentukan oleh

ketentuan hukum, tetapi oleh pelaksanaan kekuasaan mekanisme pengawasan, dan kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara mandiri.

Budaya politik menjadi salah satu perspektif untuk memahami perbedaan mengenai kebebasan berpendapat di kedua negara. Almond dan Verba (1963) menjelaskan budaya politik melalui orientasi masyarakat terhadap sistem politik, termasuk aspek pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem tersebut. Dalam lingkungan politik yang menyediakan ruang terhadap kompetisi, kritik, dan pertukaran informasi masyarakat, memiliki kesempatan besar dalam menyampaikan pandangan serta mengawasi kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, budaya politik yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan dan pengalaman sejarah dari setiap negara. Perkembangan media dan teknologi digital turut memperluas persoalan kebebasan berpendapat dalam kehidupan politik kontemporer. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dalam membentuk opini menyampaikan kritik dan keterlibatan dalam diskusi politik (Alamsyah & Ridwan, 2023). Namun, pemanfaatan terhadap media digital mengenai kebebasan berpendapat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, akses masyarakat terhadap informasi. Kebebasan media dan kebijakan pemerintah dalam mengatur komunikasi publik. Korea Selatan, perkembangan teknologi digital menyediakan keberagaman saluran komunikasi sehingga dapat digunakan masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan keterlibatan dalam perdebatan politik. Sebaliknya, pembatasan akses terhadap informasi dari luar negeri pengawasan komunikasi dan pengendalian media di Korea Utara membatasi kesempatan masyarakat dalam memperoleh, serta menyebarkan informasi secara independen. Persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Korea Utara. Melalui kajian kehidupan sehari-hari, dan pertumbuhan ekonomi pasar Korea Utara, kemudian fenomena Jangmadang menunjukkan dinamika sosial ekonomi di luar mekanisme resmi negara. melalui fenomena tersebut memberikan konteks untuk memahami perubahan hubungan masyarakat dengan negara.

Penelitian terdahulu telah membahas perbandingan sistem politik partisipasi masyarakat, dan pengendalian informasi di Korea Selatan dan Korea Utara melalui perspektif yang berbeda. perbandingan partisipasi politik dan demokrasi di kedua negara (Ayan, 2025). Sementara itu (Putri dkk. 2026), dalam penelitian media dan Sistem Negara Totaliter: perbandingan pembatasan berpendapat ruang digital Korea Utara dan Laos 2016, (Alamsyah & Ridwan, 2023), Membahas peran cyber politics dalam memperluas partisipasi publik. Sementara itu, (Zeffilda, 2025), Mengkaji keberlanjutan rezim litarian Korea Utara melalui perspektif Hannah Arendt, Sedangkan (Armah & Halimah, 2024), membahas kebijakan strategis kepemimpinan Kim jong-un dan memperkuat negara Korea Utara. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami hubungan antara sistem politik, partisipasi karakteristik rezim, dan pengendalian terhadap informasi. Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang mengintegrasikan budaya politik dan pendekatan struktural dalam menjelaskan keterkaitan antara orientasi politik masyarakat struktur kekuasaan, dan ruang kebebasan berpendapat di kedua negara. perbandingan Korea Selatan dan Korea Utara tidak hanya diarahkan pada perbedaan karakteristik demokrasi dan otoritarianisme, tetapi juga pada mekanisme yang menghubungkan struktur kekuasaan dengan kesempatan masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menyampaikan kritik. Analisis ini menempatkan keterbukaan kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses informasi sebagai dimensi yang saling berkaitan. Masyarakat dalam mengekspresikan pandangan politik. Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai Korea Selatan dan Korea Utara telah membahas perbandingan partisipasi politik, karakteristik sistem pemerintahan, serta pengendalian media dan informasi. Namun, aspek-aspek tersebut masih perlu dikaji secara terpadu untuk menjelaskan hubungan antara budaya politik, struktur kekuasaan, dan akses informasi dalam membentuk ruang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penelitian ini masih berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis komparatif yang menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam memahami perbedaan kesempatan masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik di Korea Selatan dan Korea Utara kesenjangan tersebut, melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara budaya politik dan keterbatasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara. Hal ini difokuskan pada perbedaan kesempatan masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan pendapat dan kritik, serta berinteraksi dengan pemerintah dalam konteks sistem politik di masing-masing negara. Melalui penelitian ini menggunakan perspektif budaya politik dari (Gabriel A. Almond & Sidney Verba, 1963), yang dipadukan dengan pendekatan struktural untuk memahami bagaimana

orientasi politik dengan institusi distribusi kekuasaan, dan mekanisme pengendalian informasi. Pendekatan komparatif, tidak hanya membedakan sistem demokrasi dan otoritanialisme tetapi juga mengkaji bagaimana karakteristik kelembagaan dan lingkungan politik membentuk ruang ekspresi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana interaksi antara budaya politik, struktur kekuasaan, dan akses informasi membentuk perbedaan kesempatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik di Korea Selatan dan Korea Utara, dan akses informasi dalam membentuk perbedaan, kesempatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik di Korea Selatan dan Korea Utara, Pertanyaan ini kemudian dianalisis melalui perspektif budaya politik dari Almond dan Verba menggunakan pendekatan institusional, dan struktural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif. Data penelitian berupa sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi relevan, dengan kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan publikasi akademik lainnya denan menggunakan kata kunci terkait mengenai budaya politik, kebebasan berpendapat, sistem politik, pengendalian media, dan akses informasi.

Literatur yang dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan kelengkapan informasi bibliografis. Analisis dilakukan melalui sintesis kualitatif dengan membandingkan kedua negara berdasarkan tiga aspek, yaitu budaya politik dan partisipasi masyarakat, struktur kekuasaan dan kelembagaan politik, serta kebebasan berpendapat dan akses informasi. Hasil perbandingan diinterpretasikan menggunakan teori budaya politik Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1963), serta pendekatan institusional dan struktural untuk menjelaskan perbedaan ruang kebebasan berpendapat di kedua negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara dapat dianalisis melalui struktur pemerintahan, mekanisme perlindungan hak, kebebasan media, dan pengendalian terhadap informasi. Pendekatan Institusional menekan bahwa aturan formal, organisasi politik, dan praktik lembaga pemerintahan, dapat membentuk kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. perspektif ini, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak yang diakui secara hukum, tetapi juga sebagai hak yang melaksanakan, dan dipengaruhi oleh cara institusi politik menjalankan kewenangan dan mengatur komunikasi publik. Dalam konteks Korea Selatan (Haggard & You, 2015), kebebasan berekspresi masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk hukum pencemaran nama baik, pembatasan terkait keamanan nasional, aturan kampanye pemilu, serta kontrol terhadap media. Dari temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa keberadaan sistem demokrasi secara otomatis menjamin kebebasan berekspresi tanpa hambatan. meskipun pada sistem politik Korea Selatan telah menyediakan mekanisme bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik, mengawasi pemerintah, dan menerapkan regulasi tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi ruang ekspresi warga, jurnalis, dan kelompok politik. Oleh karena itu, kualitas kebebasan berpendapat perlu dinilai berdasarkan hubungan antara jaminan hukum, dan penerapannya di dalam praktik. Perkembangan media dan demokratisasi di Korea Selatan, demokratisasi dapat memberikan peluang bagi media untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dan menyediakan informasi bagi masyarakat (Gong & Rawnsley, 2018). Namun, independensi media masih menghadapi tantangan akibat dari kepentingan pemilik media, persaingan politik, dan kondisi ekonomi industri pers. institusi media memiliki peran penting dalam membantu ruang publik tetapi efektivitasnya sebagai sarana dalam menyampaikan kritik dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan ekonomi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di Korea Selatan perlu dipahami melalui pelaksanaan aturan, independensi media dan aktivitas mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Berdasarkan pendekatan institusional perbedaan kedua negara terletak pada keterbukaan, lembaga politik, pelaksanaan perlindungan hak dan ketersediaannya saluran dalam menyampaikan aspirasi. Korea Selatan yang menyediakan ruang relatif terbuka melalui kompetisi politik dan keberagaman media dan partisipasi masyarakat sipil, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi, dan independensi media. Sebaliknya, pengendalian media, dan pembatasan informasi Korea Utara, sehingga kesempatan masyarakat dalam menyampaikan kritik

secara independen terdapat pembatasan. Dengan demikian institusi politik berperan dalam menentukan sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat.

Pendekatan struktural yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan hubungan antara negara dan masyarakat, serta penguasaan sumber informasi dapat mempengaruhi kebebasan dalam berpendapat. berbeda dengan pendekatan institusional yang menitikberatkan pada aturan dan mekanisme lembaga, pendekatan struktural memperlihatkan bagaimana susunan kekuasaan dalam membentuk kesempatan berbagai kelompok untuk mengakses informasi dalam menyampaikan kritik, dan mempengaruhi kebijakan publik di Korea Selatan. Struktur politik yang kompetisi antar partai, keberadaan oposisi, setiap aktivitas masyarakat sipil yang menyediakan saluran bagi penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Distribusi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor politik, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan, dan mendorong perubahan melalui mekanisme publik. Meskipun demikian, kesempatan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Mempengaruhi kepentingan ekonomi terhadap media dan penerapan regulasi tertentu dapat mempengaruhi kelompok atau individu dalam menyampaikan pendapat. Oeh karena itu, keterbukaan struktur politik perlu disertai distribusi akses informasi yang memadai, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Sebaliknya, Korea Utara yang memperlihatkan struktur kekuasaan sangat terpusat dengan negara memiliki Kendali terhadap lembaga politik media, dan arus informasi. Ketika akses terhadap media alternatif dan komunikasi independen dibatasi maka masyarakat memiliki lebih sedikit saluran untuk membandingkan informasi resmi dengan perspektif lain. Melalui kondisi tersebut juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membentuk ruang diskusi publik yang relatif bebas dari pengawasan negara. Struktur kekuasaan Korea Utara membatasi akses informasi, sebagian masyarakat tetap memperoleh media asing melalui jaringan informal (Kuhnhenn et al. 2020). Dari perspektif struktural fenomena tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang tidak sepenuhnya seimbang antara kemampuan negara pengendalian informasi dan praktik masyarakat dalam mencari sumber alternatif. Namun, jaringan informasi tersebut terdapat keberadaan sistem media independen yang terlindungi secara hukum karena aksesnya terhadap berlangsung dalam kondisi pembatasan dan risiko.

Perbandingan struktural kedua negara dapat menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber informasi yang beragam. di Korea Selatan keberadaan berbagai faktor politik dan saluran komunikasi dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik meskipun masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Di Korea Utara kekuasaan dan pengendalian informasi terdapat pembatasan pada kesempatan. Dengan demikian, pendekatan struktural dapat membantu menjelaskan bagaimana kebebasan berpendapat ini berbeda secara mendasar, meskipun kedua negara memiliki masyarakat yang sama-sama dapat mengembangkan pandangan dan penilaian politik.

Melalui pendekatan institusional dan struktural menunjukkan bahwa perbedaan kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara dapat terbentuk melalui hubungan antara aturan politik dan distribusi kekuasaan. melalui pendekatan institusional menjelaskan bagaimana peraturan lembaga pemerintah mekanisme perlindungan hak dan menentukan saluran formal untuk me nyampaikan pendapat. Sementara itu, pendekatan struktural dapat menjelaskan bagaimana pemusatan distribusi kekuasaan, hubungan negara dengan masyarakat serta penguasaan informasi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menggunakan saluran tersebut.

Tabel

Tabel 1. Perbandingan Kebebasan Berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara

No.	**Korea Selatan**	***Korea Utara***
1	Demokrasi Elektroral	*Otoriter*
2.	Kebebasan Berpendapat	*Di batasi*
3.	relatif terbuka	*Dikendalikan*
4.	Media Beragam	*negara*
	Akses Informasi Luas	*Akses terbatas*
5.	Kritik Publik di perbolehkan	*Kritik berisiko*

Sumber: Diolah berdasarkan United Nations Human Rights Council, 2014, Dan Human Rights Watch, 2024

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara berkaitan dengan interaksi antara budaya politik, struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses informasi yang terdapat perbedaan. Korea Selatan memiliki ruang kebebasan dalam berpendapat yang relatif terbuka melalui kompetisi politik, keberagaman media, dan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan independensi media. sebaliknya, pemusatan kekuasaan dan pengendalian informasi di Korea Utara membatasi akses masyarakat terhadap informasi independen serta kesempatan menyampaikan kritik secara terbuka. Meskipun demikian peredaran media alternatif melalui jaringan informasi dapat menunjukkan bahwa praktik masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan resmi negara. Melalui teori budaya politik Almond dan Verba, menggunakan pendekatan institusional dan struktural, penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena menggunakan data sekunder melalui tinjauan pustaka dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi independen mengenai Korea Utara menyebabkan orientasi politik masyarakat dan praktik kebebasan berpendapat tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Maka dari itu mekanisme perlindungan hak dan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi. interpretasi mengenai orientasi politik khususnya masyarakat Korea Utara perlu dilakukan secara hati-hati. Dengan demikian kebebasan berpendapat perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara sistem politik struktur kekuasaan, dan praktik sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan pada 1962).

Lankov, A. (2007). The real North Korea: Life and politics in the failed Stalinist utopia. Oxford University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.). SAGE Publications.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Ayan, E. (2025). Political participation and democracy comparison of South Korea and North Korea. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (27), 54–70. https://doi.org/10.58724/assam.1744156

Armah, A., & Halimah, I. (2024). Kemandirian kepemimpinan Kim Jong-un: Analisis kebijakan-kebijakan strategis dalam menguatkan negara Korea Utara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA), 5(2). https://doi.org/10.58791/febi.v5i02.194

Alamsyah, S., & Ridwan. (2023). Cyberpolitics dalam Aktivisme Politik Digital untuk Menjangkau Partispasi Publik. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, *7*(1).

Choi, C. (2013). "Everyday politics" in North Korea. The Journal of Asian Studies, 72(3), 655–673. https://doi.org/10.1017/S0021911813000545

Freedom House. (2024). North Korea: Freedom in the world 2024. https://freedomhouse.org/country/north-korea/freedom-world/2024

Gong, Q., & Rawnsley, G. (2018). Media freedom and responsibility in South Korea: The perceptions of journalists and politicians during the Roh Moo-hyun presidency. Journalism, 19(9–10), 1257–1274. https://doi.org/10.1177/1464884916688287

Haggard, S., & You, J. S. (2015). Freedom of expression in South Korea. Journal of Contemporary Asia, 45(1), 167–179. https://doi.org/10.1080/00472336.2014.947310

Human Rights Watch. (2024). A sense of terror stronger than a bullet: The closing of North Korea 2018 –2023. https://www.hrw.org/report/2024/03/07/a-sense-of-terror/stronger-than-a-bullet-the-closing-of-north-korea-2018-2023

Kim, Y. (2024). Illicit media, reflexivity and sociocultural change in North Korea. International Journal of Cultural Studies, 27(2), 165–180. https://doi.org/10.1177/13678779231211919

Kuhnhenn, M., Lee, M., & Zhang, W. (2020). Media liberalization: Control and consumption of foreign media in North Korea, China, and East Germany. International Journal of Communication, 14

Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N. (2022). Upaya Korea Women's Association United dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik Korea Selatan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1). https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025). Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/60/58). United Nations. https://seoul.ohchr.org/en/reports

Putri, A. D. E., Zahra, M. H., Verrel, S., Tridjadja, S. C., Ramadhan, F. R., & Angela, D. (2026). Media dalam sistem negara totaliter: Perbandingan pembatasan berpendapat ruang digital Korea Utara dan Laos 2016. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18(1), 30–41. https://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.21913

Robbani, A. Y., Novandra, A. Y., Yahya, A. K., Fikri, H., & Aji, M. P. (2025). Dampak cyberpolitik terhadap masyarakat Korea Utara: Studi kasus pengendalian media sosial di Korea Utara. Jurnal Politikom Indonesiana, 10(2), 104–115. https://doi.org/10.35706/jpi.v10i2.13147

Seo, S., & Nah, S. (2020). Mapping communication research concerning North Korea: A systematic review (2000–2019). International Journal of Communication, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10911tk0911?

Tasya, L. M., Arsyada, S. A., Fadhilah, J., Al Hafiz, R. A., Hafidz, H. S., & Nisa, P. K. (2025). Analisis strategis public relations politik Yoon Suk-yeol di media sosial dalam Pemilu Korea Selatan 2022. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(8), 3552–3557. https://doi.org/10.31604/jips.v12i8.2025.3552-3557

United Nations Human Rights Council. (2014). Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People's Republic of Korea (A/HRC/25/63). United Nations. https://undocs.org/A/HRC/25/63

Wardah, S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2025). Perbandingan sistem politik demokrasi dan otoriter (studi kasus Korea Selatan dan Korea Utara). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(5.C), 189–194. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11938

Zefilda, G. (2025). Analysis of the sustainability of North Korea's totalitarian regime from Hannah Arendt's perspective: Analisis keberlanjutan rezim totalitarian Korea Utara dalam perspektif Hannah Arendt. Jurnal PIR: Power in International Relations, 10(1), 53–63. https://doi.org/10.22303/pir.10.1.2025.53-63